MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA JAWA TIMUR TAHUN 2021

Bunga Pratiwi[1]
Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
pratiwib877@gmail.com

Abstract
This study aims to determine the effect of the open unemployment rate on the poverty rate in Regencies/Cities of East Java Province in 2021. The problem of poverty is a complex issue that is closely related to the dynamics of employment, especially unemployment. In this study, secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) was used, with a quantitative analysis method using simple linear regression. The research population covers all districts and cities in East Java, with a total sampling approach of 38 regions. This research is expected to provide an empirical picture of the relationship between unemployment and poverty, as well as be an input for local governments in formulating poverty alleviation policies based on employment development. By understanding the pattern of the relationship between the two variables, it is hoped that regional development strategies can be more directed and have a long-term impact.
Keywords: Open Unemployment, Poverty, East Java, Regression Analysis, Development Policy.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021. Permasalahan kemiskinan merupakan isu kompleks yang berkaitan erat dengan dinamika ketenagakerjaan, khususnya pengangguran. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dengan metode analisis kuantitatif menggunakan regresi linear sederhana. Populasi penelitian mencakup seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur, dengan pendekatan total sampling sebanyak 38 wilayah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai keterkaitan antara pengangguran dan kemiskinan, serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis pengembangan lapangan kerja. Dengan memahami pola hubungan kedua variabel tersebut, diharapkan strategi pembangunan daerah dapat lebih terarah dan berdampak jangka panjang.
Kata Kunci: ***Pengangguran Terbuka, Kemiskinan, Jawa Timur, Analisis Regresi, Kebijakan Pembangunan.***

Article history
Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagirism checker no 80
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan isu fundamental yang terus menerus menjadi perhatian dalam pembangunan sosial ekonomi di Indonesia. Masalah ini tidak hanya menyangkut rendahnya pendapat masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya akses terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kurangnya lapangan pekerjaan yang layak. Kondisi tersebut menimbulkan ketimpang sosial dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

berkelanjutan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional dan daerah.

Di antara berbagai faktor yang mempengaruhi kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) memiliki peran yang cukup signifikan. Pengangguran terbuka mencerminkan jumlah angkatan kerja yang cukjup efektif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan kesempatan kerja. Fenomena ini tidak hanya menandakan rendahnya efisiensi pasar tenaga kerja, tetapi juga menunjukkan adanya hambatan struktural dalam penyediaan lapangan kerja. Semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin besar pula potensi peningkatan jumlah penduduk miskin, karena keterbatasan akses terhadap penghasilan menjadi penyebab utama kemiskinan (Asrahmaulyana dan Qarina, 2020).

Jawa Timur sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, baik dari sisi jumlah penduduk maupun kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), memiliki dinamika sosial ekonomi yang kompleks. Menurut data BPS, jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2021 mencapai lebih dari 41 juta jiwa. Namun demikian, pemerataan pembangunan di provinsi ini belum sepenuhnya merata. Terdapat perbedaan signifikan antara kabupaten/kota dalam hal kesejahteraan masyarakat, angka pengangguran, dan tingkat kemiskinan.

Pada tahun 2021, BPS mencatat bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Timu berada pada angka 11,40% atau sekitar 4,25 juta penduduk. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,68%. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa masih terdapat jutaan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan sebagian di antaranya juga menghadapi tantangan dalam mengakses pekerjaan yang layak (BPS Provinsi Jawa Timur, 2024). Dalam konteks ini, penting untuk meneliti sejauh mana tingkat pengangguran terbuka memengaruhi kondisi kemiskinan d berbagai wilayah Jawa Timur.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah tingkat angka pengangguran di suatu daerah tertentu memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap tingkat angka kemiskinan di daerah tersebut? Apakah terdapat perbedaan pola hubungan antara daerah pedesaan dan perkotaan dalam hal angka pengangguran dan kemiskinan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting dalam menentukan kebijakan yang lebih akurat dan masuk akal. Memahami hubungan antara TPT dan kemiskinan akan memberikan informasi yang lebih akurat tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Jawa Timur.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Menurut (Susanti et al., 2020) pengangguran berdampak langsung terhadap pendapatan rumah tangga, yang kemudian memengaruhi daya beli dan akses terhadap kebutuhan dasar. Dalam jangka panjang, pengangguran yang tinggi dapat memperburuk ketimpangan sosial dan memperbesar kelompok masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan kronis. Oleh karena itu, pengangguran bukan sekadar isu pasar tenaga kerja, tetapi juga persoalan struktural dalam pembangunan ekonomi.

Namun, hubungan antara pengangguran dan kemiskinan tidak selalu linier atau langsung. Faktor-faktor lain, seperti pendidikan, kualitas kerja, dan struktur ekonomi lokal, semuanya berkontribusi terhadap situasi tersebut di atas. Beberapa daerah dengan TPT yang relatif rendah memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi sebagai akibat dari produktivitas tempat kerja yang rendah dan dominasi sektor informal dengan upah yang rendah. Karena itu, analisis empiris berdasarkan data dari provinsi atau kota sangat penting untuk memahami isu-isu spesifik yang muncul di tingkat lokal.

Dengan memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik, penelitian ini difokuskan pada analisis 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur hingga tahun 2021. Tahun 2021 dipilih karena merupakan masa transisi pandemi COVID-19 pertama, yang berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah dan produktivitas tempat kerja. Banyak sektor usaha yang mengalami disrupsi, yang pada akhirnya meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Melalui analisis kuantitatif menggunakan regresi linier, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak jangka panjang TPT terhadap tingkat kemiskinan antarwilayah.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi empiris terhadap literatur tentang pembangunan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh variabel ekonomi makro regional terhadap kesejahteraan umum penduduk. Yang lebih penting lagi, hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi kemiskinan yang terintegrasi dengan pengembangan jadwal kerja produktif. Perumusan kebijakan berbasis bukti sangat penting untuk membuat program sosial dan ekonomi lebih akurat dan komprehensif.

Dengan memahami korelasi antara pengangguran dan kemiskinan, pemerintah daerah dapat merancang intervensi yang tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga pada upaya peningkatan keterampilan, kewirausahaan, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, studi ini menjadi relevan dan strategis untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama tujuan pertama (mengakhiri kemiskinan) dan tujuan kedelapan (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi).

2. Tinjauan Pustaka

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator penting dalam mengukur efisiensi pasar tenaga kerja suatu daerah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) TPT didefinisikan sebagai persentase angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan namun secara aktif mencari pekerjaan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana pasar kerja mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia, serta berperan dalam menunjukkan ketahanan ekonomi suatu wilayah terhadap tekanan sosial dan ekonomi.

Pengukuran TPT umumnya dilakukan melalui survei angkatan kerja nasional yang mencakup berbagai kategori demografis, seperti umur, jenis kelamin, dan wilayah geografis. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih rinci terhadap pola pengangguran yang terjadi di masyarakat. Tingginya angka pengangguran sering kali dihubungkan dengan ketidaksesuaian antara kualifikasi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja, serta keterbatasan dalam penciptaan lapangan kerja formal (Tambunan, 2011).

Dalam konteks pembangunan daerah, TPT menjadi perhatian serius karena tingginya angka pengangguran dapat memperburuk kualitas hidup masyarakat. Individu yang tidak bekerja cenderung kehilangan akses terhadap pendapatan tetap, jaminan sosial, dan peluang peningkatan kualitas hidup. Hal ini tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi individu, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial secara lebih luas (Lewis, 2019). Oleh karena itu, pengurangan pengangguran menjadi tujuan utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang memiliki banyak sisi yang tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, baik yang berkaitan dengan makanan maupun tidak. Biasanya, indikator kemiskinan dihitung berdasarkan garis kemiskinan dan jumlah orang yang tinggal di bawah garis tersebut.

Secara umum, kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain tingkat pendidikan, akses terhadap lapangan pekerjaan, distribusi pendapatan, serta ketersediaan infrastruktur dasar. Salah satu faktor yang cukup dominan adalah pengangguran. Individu yang menganggur atau bekerja di sektor informal dengan penghasilan rendah memiliki risiko lebih tinggi untuk jatuh dalam kemiskinan. Kondisi ini diperparah apabila tidak terdapat jaring pengaman sosial yang memadai di tingkat lokal (DOXY, 1962).

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Di Jawa Timur, angka kemiskinan dan TPT menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar kabupaten/kota. Beberapa daerah dengan tingkat pengangguran tinggi juga mencatat angka kemiskinan yang tinggi. Hal ini menunjukkan adanya korelasi antara kedua variabel tersebut. Analisis empiris dibutuhkan untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh TPT terhadap kemiskinan secara statistik, sehingga dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Keterkaitan TPT dan Kemiskinan

Hubungan antara tingkat pengangguran terbuka dengan tingkat kemiskinan telah menjadi fokus berbagai penelitian ekonomi pembangunan. Teori ekonomi klasik seperti model Lewis (1954) menyatakan bahwa surplus tenaga kerja di sektor tradisional yang tidak terserap ke sektor modern dapat menciptakan kemiskinan struktural. Ketika individu tidak mampu berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, daya beli mereka menurun dan risiko keterpurukan ekonomi meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Adolph, 2016) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara pengangguran dan kemiskinan di Sulawesi Selatan. Hasil ini menguatkan hipotesis bahwa pengangguran memiliki dampak langsung terhadap kemiskinan, terutama di wilayah dengan struktur ekonomi yang belum terdiversifikasi. Oleh karena itu, dalam konteks Jawa Timur, penting untuk menguji secara kuantitatif hubungan antara TPT dan kemiskinan untuk melihat pola yang terjadi secara lokal.

Melalui penelitian empiris terhadap kota-kota di Jawa Timur pada tahun 2021, diharapkan analisis ini dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kontribusi signifikan tertentu terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan komprehensif, khususnya dalam upaya meningkatkan angka kemiskinan secara signifikan melalui penerapan jadwal kerja produktif.

3. Metodologi Penelitian

Analisis data merupakan proses mengelolah dan menafsirkan data secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. (Sugiyono, 2020) menyatakan bahwa analisis data adalah kegiatan mengorganisasi data, menyusunnya ke dalam pola, dan menarik kesimpulan yang bermakna, sehingga dapatmemberikan gambaran objektif terhadap fenomena yang diteliti. Berikut adalah data yang digunakan pada penelitian ini.

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2021	Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2021
Kabupaten Pacitan	2.04	309655
Kabupaten Ponorogo	4.38	341090
Kabupaten Trenggalek	3.53	358831
Kabupaten Tulungagung	4.91	374183
Kabupaten Blitar	3.66	335573
Kabupaten Kediri	5.15	335990
Kabupaten Malang	5.4	348695
Kabupaten Lumajang	3.51	334906
Kabupaten Jember	5.44	380397
Kabupaten Banyuwangi	5.42	387084
Kabupaten Bondowoso	4.46	423150

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Kabupaten Situbondo	3.68	336040
Kabupaten Probolinggo	4.55	451395
Kabupaten Pasuruan	6.03	368686
Kabupaten Sidoarjo	10.87	502524
Kabupaten Mojokerto	5.54	417784
Kabupaten Jombang	7.09	421172
Kabupaten Nganjuk	4.98	446232
Kabupaten Madiun	4.99	380287
Kabupaten Magetan	3.86	371182
Kabupaten Ngawi	4.25	358663
Kabupaten Bojonegoro	4.82	380653
Kabupaten Tuban	4.68	388176
Kabupaten Lamongan	4.9	419309
Kabupaten Gresik	8	505499
Kabupaten Bangkalan	8.07	432046
Kabupaten Sampang	3.45	391032
Kabupaten Pamekasan	3.1	368259
Kabupaten Sumenep	2.31	400960
Kota Kediri	6.37	506936
Kota Blitar	6.61	481229
Kota Malang	9.65	570238
Kota Probolinggo	6.55	545955
Kota Pasuruan	6.23	461624
Kota Mojokerto	6.87	493452
Kota Madiun	8.15	514409
Kota Surabaya	9.68	611466
Kota Batu	6.57	522819

Tabel 1. Data Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk Miskin
Sumber: Data diolah (BPS)

a. Variabel Observasi

Variabel bebas adalah faktor yang memengaruhi variabel lain, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT), sedangkan variabel terikatnya adalah jumlah penduduk miskin. Kedua variabel ini dianalisis untuk melihat hubungan atau pengaruh antara tingkat pengangguran terhadap jumlah kemiskinan di wilayah Jawa Timur.

b. Skala Pengukuran

Skala pengukuran adalah alat untuk menentukan tingkat data dalam suatu variabel, yang berfungsi sebagai dasar dalam pemilihan teknik analisis yang sesuai. Dalam penelitian ini, variabel tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin sama-sama menggunakan skala rasio. Skala rasio dipilih karena kedua variabel memiliki nilai numerik, nol mutlak, dan memungkinkan analisis kuantitatif yang akurat, seperti perbandingan dan proporsi (Sugiyono, 2020).

c. Data Kategori

Data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis data cross-section, yaitu data yang dikumpulkan dari beberapa unit analisis pada satu titik waktu tertentu

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

(Sugiyono, 2020). dalam hal ini, unit analisis yang diamati mencakup 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, dengan waktu pengamatan yang ditetapkan pada tahun 2021.

d. Populasi dan Sample

Populasi adalah seluruh objek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2020). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebanyak 38 wilayah. Karena seluruh data tersedia, maka teknik yang digunakan adalah total sampling, yaitu metode di mana seluruh anggota populasi yang memenuhi kriteria kelengkapan data dijadikan sebagai sampel analisis (Sugiyono, 2020).

e. Sumber Data

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui sumber yang telah dikumoulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari publikasi resmi Badan Puasat Statistik (BPS), yang menyediakan data tentang tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil Analisis Data

Statistik Deskriptif

Statistics

		Penganggura n	Kemiskinan
N	Valid	38	38
	Missing	0	0
Mean		5,5197	420462,66
Median		5,0700	395996,00
Mode		2,04[a]	309655[a]
Sum		209,75	15977581
Percentiles	10	3,4150	335948,30
	20	3,6760	356669,40
	25	4,1525	365902,00
	30	4,4360	370433,20
	40	4,8680	380550,60
	50	5,0700	395996,00
	60	5,4800	421963,20
	70	6,4240	454463,70
	75	6,5800	484284,75
	80	6,9140	503119,00
	90	8,3000	525132,60

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Sumber: SPSS 29

Keterangan:

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

a. **Jumlah Data**
   1. Pengangguran: 38 data valid
   2. Kemiskinan: 38 data valid
   3. Missing sata: 0 untuk keduanya

b. **Ukuran Pemutusan**
   1. Mean
      a. Pengangguran: 5,5197
      b. Kemiskinan: 420.462,66

      Berdasarkan nilai mean di atas, menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengangguran di kabupaten/kota Jawa Timur adalah sekitar 5,52 persen, sementara rata-rata jumlah penduduk miskin adalah sekitar 420.463 jiwa. Nilai mean ini memberikan gambaran umum tentang kondisi tengah dari data, meskipun masih perlu diperhatikan apakah distribusi data simetris atau tidak.

   2. Median
      a. Pengangguran: 5,0700
      b. Kemiskinan: 395.996,00

      Nilai median menunjukkan titik tengah data. Dalam hal ini, 50% data pengangguran berada di bawah 5,07% dan 50% berada di atasnya. Begitu pula, 50% daerah memiliki jumlah penduduk miskin di bawah 395.996 jiwa. Nilai median ini biasanya lebih stabil terhadap pencilan (outlier) dibandingkan dengan mean. Median yang lebih dekat dengan mean mengindikasikan distribusi yang relatif simetris.

   3. Modus
      a. Pengangguran:2,04
      b. Kemiskinan: 309.655

      Terdapat multiple modes pada kedua variabel, namun output SPSS hanya menampilkan nilai terkecil dari modus tersebut. Nilai modus yang rendah pada pengangguran dan kemiskinan menunjukkan bahwa sebagian daerah memiliki tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin yang rendah dan lebih sering muncul dibanding nilai lainnya.

c. **Ukuran Penyebaran**
   1. Nilai Minimum
      a. Pengangguran: 3,4150
      b. Kemiskinan: 335.948,30

      Berdasarkan nilai minimum diatas diketahui bahwa nilai terendah dalam kumpulam data.

   2. Jumlah Total
      a. Pengangguran: 209,75
      b. Kemiskinan: 15.977.581

      Berdasarkan nilai sum diatas, sum merupakan penjumlahan semua nilai data.

   3. Kuartil

Kuartil	Pengangguran	Kemiskinan
Q1	4,1525	365.902,00
Q2	5,0700	395.996,00
Q3	6,5800	484.284,75

Tabel 3. Hasil Kuartil
Sumber: SPSS 29

Pengangguran:

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

a. Q1 (25%) kabupaten/kota memiliki tingkat pengangguran kurang dari 4,15%
b. Q2 (50%) / Median: Setengah kabupaten/kota memiliki pengangguran kurang dari 5,07%
c. Q3 (75%) kabupaten/kota memiliki pengangguran kurang dari 6,58%

Kemiskinan:

a. Q1 (25%) kabupaten/kota memiliki tingkat kemiskinan kurang dari 365.902,00
b. Q2 (50%) / Median: setengah kabupaten/kota memiliki tingkat kemiskinan kurang dari 395.996,00
c. Q3 (75%) kabupaten/kota memiliki tingkat pengangguran kurang dari 484.284,75

d. Persentil

Persentil	Pengangguran	Kemiskinan
P10	3,4150	335.948,30
P20	3,6760	356.669,40
P25	4,1525	365.902,00
P30	4,4360	370.433,20
P40	4,8680	380.550,60
P50	5,0700	395.996,00
P60	5,4800	421.963,20
P70	6,4240	454.463,70
P75	6,5800	484.284,75
P80	6,9140	503.119,00
P90	8,3000	424.132,60

Tabel 4. Hasil Persentil
Sumber: SPSS 29

Persentil menggambarkan posisi nilai dalam distribusi data. Misalnya, P90 menunjukkan bahwa 90% nilai berada di bawah angka tersebut. Kenaikan nilai pada persentil menunjukkan tren peningkatan secara bertahap dalam sebaran data.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Distribusi Frejuensi

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,04	1	2,6	2,6	2,6
	2,31	1	2,6	2,6	5,3
	3,10	1	2,6	2,6	7,9
	3,45	1	2,6	2,6	10,5
	3,51	1	2,6	2,6	13,2
	3,53	1	2,6	2,6	15,8
	3,66	1	2,6	2,6	18,4
	3,68	1	2,6	2,6	21,1
	3,86	1	2,6	2,6	23,7
	4,25	1	2,6	2,6	26,3
	4,38	1	2,6	2,6	28,9
	4,46	1	2,6	2,6	31,6
	4,55	1	2,6	2,6	34,2
	4,68	1	2,6	2,6	36,8
	4,82	1	2,6	2,6	39,5
	4,90	1	2,6	2,6	42,1
	4,91	1	2,6	2,6	44,7
	4,98	1	2,6	2,6	47,4
	4,99	1	2,6	2,6	50,0
	5,15	1	2,6	2,6	52,6
	5,40	1	2,6	2,6	55,3
	5,42	1	2,6	2,6	57,9
	5,44	1	2,6	2,6	60,5
	5,54	1	2,6	2,6	63,2
	6,03	1	2,6	2,6	65,8
	6,23	1	2,6	2,6	68,4
	6,37	1	2,6	2,6	71,1
	6,55	1	2,6	2,6	73,7
	6,57	1	2,6	2,6	76,3
	6,61	1	2,6	2,6	78,9
	6,87	1	2,6	2,6	81,6
	7,09	1	2,6	2,6	84,2
	8,00	1	2,6	2,6	86,8
	8,07	1	2,6	2,6	89,5
	8,15	1	2,6	2,6	92,1
	9,65	1	2,6	2,6	94,7
	9,68	1	2,6	2,6	97,4
	10,87	1	2,6	2,6	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

Tabel 5. Hasil Distribusi Frekuensi Pengangguran
Sumber: SPSS 29

Keterangan:
Interval Pengangguran
1. 2,00 – 3,49
2. 3,50 – 4,99
3. 5,00 – 6,49
4. 6,50 – 7,99
5. 8,00 – 9,49
6. 9,50 – 10,99

Distribusi frekuensi tingkat pengangguran di Jawa Timur menunjukkan bahwa data tersebar merata tanpa adanya nilai yang dominan, dengan tingkat pengangguran terendah sebesar 2,04% dan tertinggi 10,87%. Interval terbanyak berada pada kisaran

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

3,50–4,99% yang mencakup 34,2% wilayah, mencerminkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota memiliki tingkat pengangguran menengah. Sebaran ini menunjukkan variasi yang cukup tinggi antar wilayah, yang dapat dipengaruhi oleh perbedaan struktur ekonomi, akses pendidikan, dan ketersediaan lapangan kerja, sehingga diperlukan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih terarah dan spesifik untuk setiap daerah.

~~a.~~b. Jumlah Penduduk Miskin

Kemiskinan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	309655	1	2,6	2,6	2,6
	334906	1	2,6	2,6	5,3
	335573	1	2,6	2,6	7,9
	335990	1	2,6	2,6	10,5
	336040	1	2,6	2,6	13,2
	341090	1	2,6	2,6	15,8
	348695	1	2,6	2,6	18,4
	358663	1	2,6	2,6	21,1
	358831	1	2,6	2,6	23,7
	368259	1	2,6	2,6	26,3
	368686	1	2,6	2,6	28,9
	371182	1	2,6	2,6	31,6
	374183	1	2,6	2,6	34,2
	380287	1	2,6	2,6	36,8
	380397	1	2,6	2,6	39,5
	380653	1	2,6	2,6	42,1
	387084	1	2,6	2,6	44,7
	388176	1	2,6	2,6	47,4
	391032	1	2,6	2,6	50,0
	400960	1	2,6	2,6	52,6
	417784	1	2,6	2,6	55,3
	419309	1	2,6	2,6	57,9
	421172	1	2,6	2,6	60,5
	423150	1	2,6	2,6	63,2
	432046	1	2,6	2,6	65,8
	446232	1	2,6	2,6	68,4
	451395	1	2,6	2,6	71,1
	461624	1	2,6	2,6	73,7
	481229	1	2,6	2,6	76,3
	493452	1	2,6	2,6	78,9
	502524	1	2,6	2,6	81,6
	505499	1	2,6	2,6	84,2
	506936	1	2,6	2,6	86,8
	514409	1	2,6	2,6	89,5
	522819	1	2,6	2,6	92,1
	545955	1	2,6	2,6	94,7
	570238	1	2,6	2,6	97,4
	611466	1	2,6	2,6	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

Tabel 6. Hasil Distribusi Frekuensi Kemiskinan

Sumber: SPSS 29

Keterangan

Interval kemiskinan:

1. 309,000 – 353,999
2. 354,000 – 398,999
3. 399,000 – 443,999
4. 444,000 – 488,999
5. 489,000 – 533,999
6. 534,000 – 578,999
7. 579,000 – 623,999

Data kemiskinan menunjukkan penyebaran yang cukup merata, dengan konsentrasi tertinggi berada di interval 354.000–398.999 yang mencakup 11 wilayah. Hal ini

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

mengindikasikan bahwa sebagian besar daerah dalam sampel memiliki jumlah penduduk miskin dalam kisaran tersebut. Sementara itu, jumlah wilayah dengan tingkat kemiskinan sangat rendah (di bawah 354.000) dan sangat tinggi (di atas 579.000) relatif sedikit, hanya masing-masing 4 dan 3 wilayah, yang menunjukkan distribusi data mendekati normal. Data ini bisa mencerminkan kondisi ketimpangan kemiskinan yang moderat, dengan sebagian besar wilayah berada dalam satu kelompok kelas tengah.

Analisis Regresi Sederhana

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	257369,335	21994,902		11,701	,000	212761,606	301977,064
	Pengangguran	29547,300	3749,997	,796	7,879	,000	21941,954	37152,647

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Tabel 7. Hasil Uji Analisis Regresi Sederhana

Sumber: SPSS 29

Hasil uji regresi sederhana menunjukkan bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Nilai koefisien regresi (B) untuk variabel pengangguran sebesar 29.547,300, yang berarti setiap peningkatan satu satuan pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan sebesar 29.547 jiwa, dengan asumsi variabel lain konstan. Konstanta sebesar 257.369,335 menunjukkan bahwa jika tidak ada pengangguran, maka jumlah kemiskinan diperkirakan sebesar 257.369 jiwa. Karena koefisien B bernilai positif dan signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa pengangguran berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat kemiskinan

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	257369,335	21994,902		11,701	,000	212761,606	301977,064
	Pengangguran	29547,300	3749,997	,796	7,879	,000	21941,954	37152,647

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Tabel 8. Hasil Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen (pengangguran) terhadap variabel dependen (kemiskinan). Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 7,879 dan signifikansi (Sig.) = 0,000, yang jauh lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan secara statistik. Dengan demikian, secara parsial, pengangguran terbukti memiliki pengaruh yang nyata terhadap peningkatan jumlah kemiskinan di wilayah yang diteliti.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,796[a]	,633	,623	45852,341

a. Predictors: (Constant), Pengangguran

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan output model summary, nilai R Square sebesar 0,633 menunjukkan bahwa 63,3% variasi perubahan dalam tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel pengangguran. Sementara itu, sisanya 36,7% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini, seperti pendidikan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, atau kebijakan sosial. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,623 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan sampel, model tetap cukup kuat. Dengan demikian, model regresi ini memiliki kemampuan penjelasan yang baik, di mana pengangguran menjadi faktor signifikan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan.

Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2021

Nilai uji t sebesar 7,879 dengan signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Hasil ini diperoleh melalui analisis regresi linear sederhana yang menunjukkan bahwa semakin tinggi angka pengangguran, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan di suatu daerah. Koefisien regresi sebesar 29.547,3 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu persen dalam tingkat pengangguran terbuka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 29.547 jiwa, dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Hasil ini mengindikasikan bahwa pengangguran merupakan faktor ekonomi penting yang memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketika banyak masyarakat usia produktif tidak memiliki pekerjaan, daya beli menurun, dan risiko terhadap kemiskinan meningkat. Di sisi lain, penciptaan lapangan kerja yang inklusif dapat menjadi solusi untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara langsung. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan di Jawa Timur perlu memasukkan pengurangan pengangguran sebagai komponen utama dalam kebijakan pembangunan daerah.

Koefisien determinasi (R Square) sebesar **0,633** menunjukkan bahwa sebesar 63,3% variasi dalam tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh tingkat pengangguran terbuka, sedangkan sisanya 36,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model, seperti tingkat pendidikan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, atau akses terhadap layanan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengangguran berpengaruh signifikan, faktor lain juga memiliki peran penting dalam membentuk angka kemiskinan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan bukti kuat bahwa upaya pengurangan pengangguran terbuka perlu diprioritaskan sebagai strategi utama dalam menanggulangi kemiskinan di daerah. Pemerintah daerah dapat berperan dengan mendorong investasi sektor padat karya, pelatihan keterampilan kerja, dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) guna menyerap tenaga kerja lokal. Jika dilakukan secara konsisten dan merata, kebijakan ini dapat menurunkan ketergantungan terhadap bantuan sosial sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat miskin di Jawa Timur.

5.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa TPT memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu persen dalam TPT berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 29.547 jiwa. Nilai signifikansi uji t sebesar 0,000 menegaskan bahwa hubungan tersebut valid secara statistik. Selain itu, koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,633 mengindikasikan bahwa 63,3% variasi dalam tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh tingkat pengangguran terbuka.

Temuan ini menegaskan pentingnya penciptaan lapangan kerja produktif dalam rangka menekan angka kemiskinan. Ketika masyarakat usia kerja tidak mendapatkan pekerjaan, pendapatan rumah tangga menurun sehingga meningkatkan risiko kemiskinan. Oleh karena itu, strategi pengurangan pengangguran terbuka perlu diprioritaskan oleh pemerintah daerah, antara lain melalui pelatihan keterampilan, penguatan UMKM, dan penciptaan iklim investasi yang mendukung.

Peneiti ini juga menggarisbawahi bahwa meskipun TPT merupakan faktor dominan, masih terdapat faktor-faktor lain yang turut memengaruhi tingkat kemiskinan seperti kualitas pendidikan, distribusi pendapatan, serta infrastruktur sosial ekonomi. Penanganan kemiskinan yang efektif membutuhkan pendekatan multidimensi dan lintas sektor.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berbasis bukti. Pemerintah daerah Jawa Timur harus mengintegrasikan penanganan pengangguran dalam kerangka strategi penanggulangan kemiskinan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

[1] Adolph, R. (2016). 済無 No Title No Title No Title. 1–23.
[2] Asrahmaulyana dan Qarina. (2020). Pengantar ekonomi makro. In Terjemahan Chriswan Sungkono. Jakarta: Salemba Empat (Issue May).
[3] BPS Provinsi Jawa Timur. (2024). Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur 2023. BPS Jawa Timur, 20, 1–78. https://jatim.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=Tenaga+kerja&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan
[4] DOXY, G. V. (1962). The Economics of Underdevelopment. South African Journal of Economics, 30(2), 169–169. https://doi.org/10.1111/j.1813-6982.1962.tb02428.x
[5] Lewis, P. M. (2019). Economic growth and development. Routledge Handbook of Democratization in Africa, 2018(July), 419–433. https://doi.org/10.4324/9781315112978-30
[6] Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). 1–781.
[7] Susanti, A., Fahrudin, A., & Kusumastanto, T. (2020). Economic Impact of IUU Fishing on Big Pelagic Fish in WPPNRI 715. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 15(2), 135.
[8] Tambunan, T. T. (2011). Teori Ekonomi Makro.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359